
Modal Sosial dalam Keterpilihan Perempuan Calon Gubernur: Studi Kasus Karolin Margret Natassa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018

Dewi Arum Nawang Wungu

Progam Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

(email: nawangwungu.dewiarum@gmail.com)

Abstract

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route.

Keyword:

social capital; local election; women; Gubernatorial; political pathways

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan

pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe *bridging* dan *linking*, dimana kepercayaan yang diperoleh (*earned trust*) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput.

Kata Kunci:

modal sosial; pilkada; perempuan; Gubernur; jalur politik

Pendahuluan

Daniel Markham Smith (dalam Purwaningsih, 2015), menyebut bahwa sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (*candidate-centered electoral systems*) pada akhirnya mendorong seorang calon kepala daerah untuk memiliki kemampuan menarik dukungan pemilih sebanyak mungkin. Mekanisme Pilkada langsung otomatis mendorong figur kandidat untuk selalu berinteraksi dengan calon pemilih sejak masa penjangkaran, nominasi, pencalonan, masa kampanye dan terus berlanjut hingga hari pemilihan. Tidak jarang aspek relasi kuasa dan kekuatan politik kekerabatan justru lebih menentukan siapa calon yang akan diusung oleh partai politik, meskipun figur tersebut tidak memiliki kecukupan popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Koalisi politik tidak dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi, visi politik atau kebijakan dalam program kerja. Dalam konteks ini, politik elektoral sering menunjukkan berada dibawah kontrol kekuatan yang disebut sebagai kekuatan oligarki (Karni, Hernawan, & Pamungkas, 2010).

Persoalannya kemudian, dengan mekanisme Pilkada yang tak ubahnya pasar bebas, dimana figur yang dicalonkan merupakan produk yang diharapkan mampu menjawab persoalan di daerah sekaligus memiliki kualitas moral, citra positif serta rekam jejak personal dan profesional yang didambakan masyarakat, apakah perempuan memiliki pra kondisi atau struktur kesempatan yang memungkinkan mereka ikut berkompetisi secara setara, bebas, dan terbuka sesuai spirit demokrasi? Apakah selama 16 tahun pelaksanaan desentralisasi politik di Indonesia, Pilkada telah menjadi ruang berpolitik yang nyaman bagi perempuan? Pertanyaan ini penting berkaitan dengan Pilkada sebagai alat demokrasi, dimana prinsip dasarnya adalah kesetaraan tiap individu, sehingga serta merta tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan.

Meski harus diakui bahwa kemunculan perempuan dalam pranata eksekutif di tingkat lokal adalah hasil positif dari penyelenggaraan desentralisasi politik, fakta menunjukkan dari 11 kali siklus pemilihan langsung yang sudah berjalan sejak tahun

2005-2018, keterwakilan perempuan sebagai calon di dalam Pilkada masih rendah. Sehingga angka keterpilihan perempuan sebagai eksekutif di tingkat lokal otomatis turut menjadi lebih rendah. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah perempuan terpilih sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan jumlah laki-laki terpilih sebagai Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah selama 2005-2018 (rezim Pilkada langsung).

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Keterpilihan Kada/Wakada Perempuan dengan Kada/Wakada Laki-Laki Dalam Pilkada Langsung 2005 s/d 2018

Tahun Pilkada	Jumlah Pilkada	Jumlah Calon Kepala Daerah Perempuan	%	Jumlah Calon Kepala Daerah Laki-laki	%
2005	213	12	5.6	201	94.4
2006	78	7	9.0	71	91.0
2007	41	3	7.3	38	92.7
2008	154	3	1.9	151	98.1
2010	224	27	12.1	197	87.9
2011	87	7	8.0	80	92.0
2012	74	7	9.5	67	90.5
2013	150	16	10.7	134	89.3
2015	269	45	16.7	224	83.3
2017	101	13	12.9	88	87.1
2018	171	30	17.5	141	82.5
Total	1562 Pilkada	170	10.9	1392	89.1

Sumber: Diolah kembali dari kpu.go.id dan Cakra Wikara Indonesia: *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. PSJ UI: Depok, Oktober 2018

Masih ada ketimpangan angka keterpilihan antara perempuan dan laki-laki yang sangat jauh dalam kompetisi eksekutif di tingkat lokal baik sebagai Kepala Daerah (Kada) maupun Wakil Kepala Daerah (Wakada). Dari total 1.562 Pilkada yang telah terlaksana sejak tahun 2005 hingga 2018, prosentase keterpilihan perempuan hanya 10,9%. Sementara prosentase keterpilihan laki-laki mencapai 89%. Hingga tahun 2020 ini artinya hanya ada 170 perempuan yang berhasil meraih jabatan sebagai Kada dan Wakada di tingkat Propinsi, Kota, dan Kabupaten di seluruh Indonesia.

Representasi perempuan di legislatif bisa dikatakan lebih dinamis karena memiliki alat bantu berupa kebijakan afirmasi 30 persen. Meskipun kuota 30 persen belum maksimal, namun harus diakui merupakan terobosan yang membuka ruang partisipasi politik perempuan. Kebijakan afirmatif merupakan “struktur kesempatan” yang sengaja diciptakan untuk mengintervensi percepatan keterwakilan perempuan. Sementara itu di level kepemimpinan daerah, belum ada “struktur kesempatan” yang bekerja layaknya kebijakan afirmatif. Artinya betul-betul menjamin eksistensi perempuan dalam kepemimpinan daerah. Padahal munculnya perempuan Kepala Daerah merupakan indikator bahwa kepemimpinan perempuan sudah tidak lagi menjadi tabu dalam politik Indonesia kontemporer (Tim Peneliti Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2011).

Tabel 1.2
Jumlah Keterpilihan Perempuan dalam Tiap
Posisi Jabatan Eksekutif Lokal

Posisi Jabatan Eksekutif Lokal Diraih Perempuan 2005-2018	Jumlah
Gubernur	2
Wakil Gubernur	4
Bupati	62
Wakil bupati	62
Walikota	17
Wakil Walikota	23
Total	170 Perempuan

Sumber: Diolah dan dielaborasi kembali dari kpu.go.id dan Cakra Wikara Indonesia: *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. PSJ UI: Depok, Oktober 2018

Level of playing field atau tingkat kerumitan politik dalam lanskap pemilihan Gubernur berbeda dengan Kota dan Kabupaten. Terdapat aspek kuantitas yang harus dipertimbangkan. Bersaing merebut dukungan dari jumlah pemilih yang lebih besar dan sebaran wilayah yang lebih luas, berarti membutuhkan lebih banyak sumber daya (finansial dan sosial) untuk membuka peluang mobilisasi. Motivasi serta dukungan (*supports*) politik dari berbagai tokoh dan elite lokal, ragam organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan dan kekuatan informal lain memungkinkan dinamika politik menjadi lebih problematik dan multidimensional, jika tidak dikelola dan didayagunakan dengan baik. Dibutuhkan keterampilan interpersonal dan integritas untuk menjalankan komitmen serta komunikasi politik yang serba cepat dan berubah.

Barangkali kerumitan politik tersebut belum bisa dikelola oleh kebanyakan calon perempuan di Indonesia, dikarenakan adanya dikotomi yang cukup ketat antara ruang publik dan ruang privat selama dibawah kendali sistem pemerintahan Orde Baru. Konsep Ibuisme Negara yang disosialisasikan dan diinternalisasikan secara terstruktur kedalam tiap sendi pranata sosial masyarakat kala itu, memunculkan rasa tidak percaya diri yang berlarut-larut pada diri perempuan (Saskia Eleonora Wirienga, 1999). Perempuan selalu diganjil oleh *multiple hindrance* (kultural dan struktural) yang telah berurat akar dalam tatanan sosial dan politik. Farzana Bari (2005) menyebutkan bahwa eksklusivitas terhadap perempuan adalah hasil dari ideologi patriarki yang telah lama terjadi dan hal itu menentukan model relasi antara perempuan dan politik. Ideologi patriarki, lanjutnya, beroperasi melalui struktur sosial budaya dan ekonomi dan menciptakan disparitas modal sosial (*social capital*) dan kapasitas politik (*political capacity*) antara perempuan dan laki-laki.

Adanya disparitas modal sosial (*social capital*) dan kapasitas politik (*political capacity*) antara perempuan dan laki-laki yang dikemukakan oleh Farzana Bari, biasanya turut menentukan motivasi awal para perempuan untuk bersedia terlibat atau dilibatkan (baik secara aktif maupun pasif) sebagai calon dalam proses elektoral. Maka penting untuk mendalami dimensi modal sosial dan ketrampilan bersiasat dalam kepentingan elektoral oleh perempuan calon kepala daerah. Kedua hal tersebut nantinya juga ikut memperlihatkan apakah yang terjadi dalam proses politik mereka adalah sebuah pragmatisme politik atau upaya pewarisan nilai politik tertentu. Penelitian ini secara khusus ingin menggali bagaimana pendayagunaan modal sosial dan

strategi yang dilakukan oleh dua calon Gubernur perempuan yang berkompetisi pada Pilkada serentak 2018. Mereka adalah Karoline Margret Natassa (Karolin) yang maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa (Khofifah) sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini hendak menjawab tiga pertanyaan mendasar. Pertama, modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Khofifah dan Karolin untuk berkompetisi sebagai calon Gubernur dalam Pilkada serentak 2018. Kedua, bagaimana Khofifah dan Karolin mendayagunakan modal sosial yang dimiliki sebagai salah satu instrumen yang dapat mendorong peluang keterpilihan mereka sebagai Gubernur, Ketiga, masuk dalam kategori jalur politik (*political pathways*) yang manakah keduanya.

Tinjauan Kepustakaan Teori Modal Sosial

Pierre Bourdieu telah mengidentifikasi modal sosial berada pada tingkat individu. Dalam sebuah tulisan berjudul *"The Forms of Capital"* (1986), ia mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Bourdieu:

"..the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition or in other words, to membership in a group which provides each of its members with the backing of the collectivity-owned capital, a credential which entitles them to credit, in the various senses of the word. (Bourdieu 1986)

Bourdieu meyakini modal sosial dapat menjadi alat perjuangan kelas. Bertolak dari pola pikir tersebut maka Bourdieu memaknai modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap, dengan didasarkan pada asas saling kenal dan saling mengakui yang saling menguntungkan (Bourdieu, 1986).

Jika dijabarkan lebih rinci, teori modal sosial Bourdieu dapat dipahami sebagai berikut; Pertama, letak modal sosial ada pada level individu, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tergantung pada kemauan orang tersebut dalam memobilisasi hubungan dan jaringan dalam kelompok atau orang lain di luar kelompok. Kedua, hubungan yang dibangun oleh seseorang tergantung kualitas hubungan tersebut. Oleh sebab itu, jaringan sosial tidak bersifat alami, melainkan dibentuk melalui strategi investasi yang berorientasi kepada kelembagaan hubungan kelompok yang dapat digunakan sebagai sumber untuk meraih keuntungan. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas

maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya.

Penelitian ini juga akan menggunakan tiga tipe modal sosial yang diajukan oleh Robert Putnam (2000) untuk menggambarkan berbagai jenis ikatan jaringan. Merujuk Putnam, dalam dimensi struktural dikenal tiga tipe modal sosial yaitu; Pertama, modal sosial *bonding* (mengikat) yang cenderung mendorong identitas eksklusif dan mempertahankan homogenitas. *Bonding* bersifat eksklusif, keanggotannya biasanya didasarkan atas berbagai kesamaan, seperti kesamaan suku, etnis dan agama, hubungan antar individu bersifat tertutup, dimana lebih mengutamakan solidaritas dan kepentingan kelompok. Kedua, modal sosial *Bridging* (menjembatani) yang bersifat dan bertujuan menyatukan (*unified*) dari beragam ranah sosial. *Bridging* ditandai oleh hubungan sosial yang bersifat terbuka (inklusif), para anggotanya mempunyai latar belakang yang heterogen. Orientasi kelompok ini lebih ditekankan upaya-upaya bersama dalam mencari jawaban atas permasalahan bersama, serta mempunyai cara pandangan keluar (*outward looking*).

Teori Woman's Political Pathways

Tipologi jalur politik yang diambil politisi perempuan akan merujuk pada trikotomi yang telah disusun oleh Nan Kyung Choi (2019) dalam tulisannya yang berjudul *Women's Political Pathways in Southeast Asia*. Tipologi dapat memberikan gambaran sekilas tentang kompleksitas kontekstual yang melatari munculnya kepemimpinan perempuan dan membatasi analisisnya pada apa yang memotivasi perempuan untuk mengejar jabatan politik serta bagaimana mereka melakukannya. Jalur politik perempuan juga dibentuk oleh bagaimana mereka mengejar dan memenangkan jabatan politik. Sumber modal politik dan strategi elektoral yang digunakan oleh calon perempuan tampaknya memengaruhi makna dan praktik representasi politik. Nan Kyung Choi (2019) mengidentifikasi tiga jalur utama yang diambil oleh politisi perempuan di Asia Tenggara.

Menurut Choi, ada tiga rute jalur politik yang diambil oleh perempuan politisi. Pertama, perempuan politisi yang mengambil alih kekuasaan "melalui medium" kerabat laki-laki. Kedua, perempuan politisi yang memiliki karir politik yang "sedari awal dibentuk oleh pilihan, atribut, dan upaya mereka sendiri, yang didasarkan pada rasa yang kuat tentang kemandirian politik (*political efficacy*) mereka sendiri". Kelompok perempuan politisi yang mengambil kekuasaan melalui medium kekerabatan masuk ke dalam kategori jalur elit, dimana kehadiran dan keterlibatannya mengandalkan kekuatan yang mengakar. Sedangkan kelompok kedua yakni perempuan politisi jalur akar rumput, yang kerap membawa isu lokal spesifik dalam tiap kampanye dan sosialisasi. Sementara itu, ada jenis kelompok ketiga yang masih perlahan terbentuk, beragam, residual, tetapi tetap signifikan dan, dalam beberapa hal mencerminkan semangat kebaruan yakni jalur tengah yang terjun secara sengaja atau justru tersandung masuk ke politik karena satu alasan (Choi, 2019).

Metodologi

Modal Sosial Bourdieau yang menyatakan bahwa modal sosial bersumber dari individu, maka modal sosial dalam tesis ini akan dianalisis dari level mikro dengan

dimensi struktural. Aspek penting dari modal sosial struktural adalah jumlah ikatan yang dimiliki seseorang, dengan siapa dan seberapa kuat ikatan tersebut. Oleh karenanya dalam dimensi struktural dikenal tiga tipe ikatan jaringan modal sosial, yakni: *bonding*, *bridging*, dan *linking*. Dalam kerangka analisis penelitian ini, yang digunakan hanya dua tipe pertama. Hubungan jaringan memfasilitasi interaksi sosial, yang pada gilirannya merangsang pemeliharaan modal sosial individu, dimana dalam hal ini individu tersebut adalah dua figur perempuan calon gubernur: Karoline Margret Natassa (Karolin) dan Khofifah Indar Parawansa (Khofifah) ketika berkompetisi dalam Pilkada serentak 2018.

Modal sosial Karolin dan Khofifah dianalisis dari tiga hal yakni Kualitas, Kredibilitas, dan Jaringan. Aspek kualitas yang dilihat diantaranya; Pendidikan, Motivasi, dan Latar Keluarga. Berikutnya adalah aspek Jaringan, dimana variabel yang diukur adalah aktivisme politik dalam partai dan organisasi sosial atau organisasi masyarakat. Modal sosial yang dimiliki Karolin dan Khofifah selanjutnya didayagunakan dalam beberapa bentuk strategi politik. Tujuan dari pendayagunaan modal sosial tersebut adalah merebut kekuasaan secara prosedural dalam mekanisme Pilkada serentak 2018. Jika modal sosial dipandang sebagai aspek statis dalam sebuah sirkuit sirkulasi kepemimpinan, maka perlu dipahami bahwa aspek statis ini juga dipengaruhi aspek dinamis dari konfigurasi politik lokal yang terbangun di daerah masing-masing. Sehingga, pendayagunaan atau strategi yang dilakukan oleh Karolin dan Khofifah juga ditentukan oleh situasi eksternal dari konstelasi politik saat itu. Selanjutnya, keseluruhan mekanisme yang digunakan oleh Karolin dan Khofifah dalam memutuskan cara atau alat mengejar jabatan politik dan kekuasaan, mengeksplorasi pilihan, memobilisasi sumber daya, mengembangkan jaringan, dan membangun gaya politik yang khas, selanjutnya akan dikategorisasi apakah masuk ke dalam jalur politik elit atau jalur politik akar rumput.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengenai keyakinan peneliti berdasarkan pengalaman dan sifat dari permasalahan, untuk memperoleh pandangan-pandangan yang segar dan baru, memberikan detil fenomena yang rumit yang sulit diungkap dengan pendekatan kuantitatif (Strauss dan Corbin, 1990). Kelebihan dari pendekatan kualitatif ialah dapat mengkonstruksikan realitas sosial, makna budaya dan fokus pada proses interaktif maupun peristiwa. Metode kualitatif adalah istilah generik untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif dan wawancara kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan utama dan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteks (Marsh dan Stoker, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengadopsi dari Punch (dalam Newmann) dengan menggunakan teknik pengumpulan data kombinasi, yaitu: wawancara mendalam (data primer), wawancara mengalir bebas, bergantung pada kualitas interaksi sosial antara peneliti dan informan. Teknik wawancara dengan metode *life-history* (pengalaman hidup perempuan eksekutif) untuk mendapatkan pengalaman individu dalam masyarakat secara detail dan mendalam, juga untuk memperoleh pandangan dari “dalam” mengenai gejala-gejala sosial dalam masyarakat dengan kedudukan perempuan (Bungin, 2001). Juga studi dokumentasi (data sekunder) data sekunder diperoleh dari artikel surat kabar *online*, portal resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur dan Kalimantan Barat, data survei dari lembaga survei

(Pollster) yang melakukan survei potensi elektabilitas sejak masa penjaringan, penyaringan, penetapan, dan jelang pemilihan, data dari website resmi komunitas atau *Non Government Organisation* (NGO). Validitas yang digunakan adalah triangulasi data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang sudah dikumpulkan (Lexy Moleong, 2005).

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah gambaran temuan hasil penelitian ini dalam bentuk tabel mengenai modal sosial individu antara Karolin dan Khofifah berdasarkan tiga indikator diatas.

Tabel 1.3
Temuan Modal Sosial Perempuan Calon Gubernur Perempuan 2018

Indikator	Karolin	Khofifah
Quality Building	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor sosialisasi nilai politik dalam keluarga sejak remaja • Menyelesaikan pendidikan Kedokteran di Jakarta (S1 dan S2 di Atmajaya) 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara mandiri terlibat dalam kegiatan organisasi di berbagai level di Kota Surabaya sejak masa remaja • Pendidikan tinggi di bidang Agama dari lembaga pendidikan agama (Sekolah agama) dan Ilmu sosial di kampus sekular (Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia)
Credibility Deepening	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai Juru Kampanye Cornelis (Ayahnya) pada Pilgub Kalbar 2007 di tiga kabupaten. • Masuk menjadi anggota PDI-P dan aktif terlibat dalam kepengurusan di DPD PDI-P Kalbar. • Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P selama 2 periode (2009-2014 dan 2014-2017) • Bupati Landak, Kalbar (2017), di tahun yang sama mendapat penghargaan menjadi bupati terbaik se-Kalbar dari LAN RI (Lembaga Akreditasi Negara Republik Indonesia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota DPRD • Anggota DPR RI era Orde Baru (PPP) • Sempat menjadi kader PPP lalu pindah menjadi kader PKB ketika Orde Baru runtuh • Menteri Pemberdayaan Perempuan era Reformasi dalam kabinet Presiden Gus Dur • Ketua PP Muslimat NU selama 4 periode • Menulis banyak esay dan menerbitkan buku soal posisi perempuan dalam NU dan politik kebangsaan di majalah Duta Masyarakat • Menteri Sosial era Demokrasi dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo
Network Activation	Organisasi Pemuda Katolik, Struktural PDI-P, Komunitas Adat Dayak dalam wadah Dewan Adat Dayak di Kalbar.	Muslimat NU, Jaringan relawan organik, elit politik lintas partai pengusung dan jaringan santri Tebu Ireng.

Sumber: Diolah penulis

Kualitas kandidat adalah karakteristik yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi (Jacobson dan Kernell, 1983). Namun demikian, belum ada indikator yang baku dalam mengukur kualitas kandidat. Kualitas ataupun kompetensi politik, menurut Almond dan Verba (1989), dipengaruhi oleh partisipasi dan pengalaman politik sebelumnya, yang didapatkan dari dalam keluarga, sekolah, dan

pekerjaan. Lebih lanjut, keduanya menyatakan bahwa pengaruh partisipasi dalam keluarga, sekolah dan pekerjaan bersifat kumulatif. Semakin aktif dalam politik, semakin baik kompetensinya. Sementara menurut Jacobson dan Kernell (1983), kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya.

Richard L. Fox dan Jennifer L. Lawless (2004) dalam sebuah tulisan artikel berjudul "*Entering the Arena? Gender and the Decision to Run for Office*" menyimpulkan bahwa perempuan akan cenderung mempertanyakan kredensial mereka ketika menentukan apakah akan mencalonkan diri untuk jabatan politik. Ketidakpercayaan diri ini membuat perempuan merasa perlu terus menambah pengalaman politiknya agar integritasnya diakui oleh lingkungan terdekat dan masyarakat yang akan menjadi calon pemilihnya. Dengan kata lain, meskipun perempuan dan laki-laki memiliki karakteristik pribadi dan profesional yang serupa, perempuan memiliki tingkat ambisi politik yang lebih rendah daripada pria. Oleh karena itu, menjadi penting bagi wanita untuk memiliki sukses sejak tingkat karir yang lebih rendah dalam jabatan politik karena adanya perbedaan gender dalam bagaimana kualifikasi mereka dilihat, baik oleh diri mereka sendiri secara pribadi maupun oleh orang lain.

Pendalaman kredibilitas diantaranya dibentuk dari rekam jejak profesi dan pengalaman politik dalam jabatan publik. Rekam jejak didasarkan pada isu apa yang selama ini melekat atau solusi masalah apa yang telah diperjuangkan dalam tiap kampanye atau putusan kebijakan. Pengalaman politik didasarkan pada seberapa lama perempuan telah memiliki pengalaman jabatan formal di ranah publik, telah melalui tingkat jabatan apa saja selama kariernya, posisi tertinggi yang pernah direbut dalam kontestasi politik, dan keterlibatan dalam organisasi profesi. Dalam hal pendalaman kredibilitas, baik Karolin dan Khofifah memulai karir politiknya dari posisi yang sama, yakni sebagai anggota legislatif.

Setelah berkiprah di ranah legislatif, keduanya kemudian sama-sama mengambil langkah masuk kedalam pranata eksekutif. Namun pada level ini, pembedanya adalah pada level jabatan yang diduduki. Khofifah dua kali mendapat kesempatan menjabat Menteri, sebuah posisi eksekutif yang tidak direbut atau dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Sementara Karolin memilih berkiprah di ruang lokal sebagai Bupati, dimana ia berhasil menang meyakinkan sebesar 90% melawan kotak kosong dalam Pilkada Kabupaten Landak di tahun 2017.

Khofifah juga tertarik menjadi eksekutif di tingkat lokal, namun dalam hal ini sebagai Gubernur. Ia tidak mengincar jabatan Bupati atau Walikota, karena ia telah mengantongi pengalaman manajemen organisasi Kementrian. Ia secara jelas menunjukkan ambisi ingin menjadi pemimpin Jatim 1. Ambisi politiknya tercermin dari keikutsertaan menjadi Calon Gubernur selama 3 kali sejak tahun 2008, 2013 dan 2018.

Aktivasi jaringan Karolin menunjukkan tipe ikatan *bonding*. Karolin memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada unsur-unsur primordial dan aliran ini. Ia nampak lebih memperkuat basis internalnya ketimbang menjangkau kelompok di luar yang juga merupakan bagian dari komposisi yang membentuk Kalbar. Aktivasi jaringan milik Khofifah lebih menonjol kepada tipe *bridging* dan *linking*. Ormas yang ia pimpin, yakni PP Muslimat NU, tidak secara gamblang ia jadikan mesin utama pemenangan. Hanya saja Muslimat NU Jatim menjadi unsur utama tersendiri, yang mana mereka memiliki ikatan emosional dengan Khofifah, yang Kiprahnya dimulai di Jatim.

Dalam trikotomi jalur politik perempuan milik Choi Nan Kyung (2018), perempuan yang mengambil kekuasaan melalui medium kekerabatan masuk ke dalam kategori jalur elit, dimana kehadiran dan keterlibatannya mengandalkan kekuatan yang mengakar (*entrenched power*). Sedangkan kelompok kedua, yakni perempuan politisi jalur akar rumput, yang kerap membawa isu lokal spesifik dalam tiap kampanye dan sosialisasi. Masuk kedalam kategori manakah Karolin dan Khofifah.

Tabel 1.4
Perbandingan Jalur Politik Perempuan Berdasarkan Trikotomi Choi Nankyung

Kategori	Elit (Karolin)	Akar Rumput (Khofifah)
Motivasi	Kehadiran dalam politik dipersuasi oleh gagasan melanjutkan <i>establishment</i> (reputasi, warisan, modal budaya, program kerja/kebijakan) yang telah dibangun dan dimiliki oleh keluarga.	Keinginan terlibat secara langsung untuk merubah keadaan secara makro agar dapat memberi peluang bagi arus bawah untuk mengalami mobilisasi sosial. Berharap dapat ikut mempengaruhi kebijakan ketika mampu mengisi posisi kekuasaan.
Strategi	Mengidentifikasi diri sebagai bagian dari dinasti politik tertentu dengan membawa nama fasilitator politik (dalam hal ini Ayah, Suami, Mertua, Ibu, Kakak) dalam momen sosialisasi dan kampanye. Pada tipe elit, perempuan politisi lebih sering muncul dalam konteks simbol untuk mengisi narasi gender. Patron politik mereka adalah anggota keluarga mereka sendiri.	Memperkuat pengalaman politik praktis dan menjadi bagian aktif dari organisasi dengan basis akar rumput. Muncul di ranah publik dengan menghadirkan persona yang lebih <i>approachable</i> bagi masyarakat arus bawah dan mengusung kebijakan yang disandarkan pada kebutuhan mendasar kelompok perempuan yang rentan posisinya dalam masyarakat. Umumnya memiliki patron politik di luar keluarga. Basis jaringannya lebih eksternal.
Sumber Daya	Mewarisi mesin politik, jaringan/koneksi politik, dan legitimasi nama besar yang telah dibentuk oleh keluarga.	Prestasi, reputasi, rekam jejak, dan afiliasi dengan sesama basis akar rumput. Selain itu seberapa kuat dan konsisten komitmennya terhadap isu dan narasi yang diperjuangkan dalam periode waktu yang lama.
Aspek Personal	Memiliki pendidikan tinggi dan baik, meski tidak memiliki jabatan atau posisi yang benar-benar <i>steady</i> sebelum terjun ke politik praktis. Stabilitas finansial bukan hasil dari profesi sendiri, namun dari limpahan fasilitator politik dalam keluarga. Pengalaman politik didapat dalam waktu yang singkat dan legitimasi Kiprahnya dilekatkan pada pencapaian yang telah dilakukan keluarganya. Secara usia, tipe elit mampu menduduki kekuasaan di usia yang relatif muda.	Membangun integritas dan legitimasi dalam waktu yang cukup lama. Seringkali mencapai posisi tertinggi dalam kekuasaan politik di usia yang cukup matang untuk ukuran perempuan Indonesia. Tidak memiliki stabilitas finansial yang luar biasa, namun dapat bertahan di politik karena memiliki jaringan luas di lintas ranah sehingga dapat memperoleh kesempatan baru.

Sumber: Diolah Penulis

Nampak dari tabel diatas, bagaimana karakteristik jalur elit lebih dominan berada pada sosok Karolin. Sebaliknya, jalur akar rumput mencerminkan fase politik Khofifah. Kita lihat pula bagaimana faktor keluarga secara konsisten muncul dalam mekanisme kemunculan Karolin. Pada jalur politik elit berdasarkan tabel figur trikotomi Choi diatas, memperlihatkan bahwa ikatan keluarga sangat penting untuk kemajuan karier politik perempuan di Indonesia pada umumnya. Perempuan dari jalur elit sering memasuki politik dengan agenda melanjutkan prestasi dan reputasi ayah, suami atau saudara laki-laki mereka. Kemandirian, visi, serta integritas para perempuan politisi dari jalur elit ini kerap diragukan akibat kecurigaan bahwa mereka hanyalah *proxy* dari politik keluarga atau dinasti politik yang melatari mereka.

Jalur politik Khofifah di sisi lain menunjukkan energi kemandirian dan fokus pada perjuangan substantif yang telah lama dimimpikan. Prosedur kemunculan yang lebih memakan waktu menghasilkan kepercayaan diri yang matang, serta daya tahan tinggi terhadap tantangan politik, yang, seringkali, berdampak lebih destruktif terhadap perempuan. Politisi perempuan dari jalur akar rumput seringkali kekurangan sistem pendukung yang memungkinkan mereka mengembangkan gaya kepemimpinan alternatif dan meningkatkan agenda politik mereka dengan visi yang lebih luas (Andrea Fleschenberg, 2008). Mereka sering memulai karir politik mereka secara informal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa modal sosial perempuan calon gubernur dibentuk oleh latar belakang mereka, yakni keluarga dan aktifitas sosial yang dialami dalam jangka waktu yang lama. Modal sosial tersebut kemudian menentukan pilihan jalur berpolitik perempuan calon gubernur. Jalur elit diambil oleh kandidat perempuan yang memiliki kekerabatan politik dengan penguasa. Sementara Jalur akar rumput diambil oleh kandidat perempuan yang muncul dari komitmen dan keterlibatan dengan isu-isu kemasyarakatan.

Temuan lain menunjukkan bahwa pengalaman politik nyatanya tidak hanya muncul sebagai aspek statis dari modal sosial. Pengalaman politik turut membentuk *political efficacy* perempuan, yang mana turut menentukan efektif tidaknya pendayagunaan modal sosial yang dimiliki. Begitu juga aspek dinamis seperti konstelasi politik lokal dan budaya politik yang terbangun di suatu daerah, yang turut menentukan seberapa jauh daya jangkauan modal sosial individu calon kepala daerah dalam sebuah kompetisi elektoral.

Konsep modal budaya Bourdieu juga menyimpan sentralitas keluarga. Modal budaya memang secara efektif ditransmisikan dalam keluarga (Bourdieu, 1986). Modal sosial dihasilkan melalui proses sosial perantara keluarga dan komunitas yang lebih luas dan terdiri dari jejaring sosial. Modal ekonomi adalah kekayaan yang diwariskan atau dihasilkan dari interaksi antar individu dan ekonomi, sedangkan modal simbolik dimanifestasikan dalam prestise individu dan kualitas pribadi, seperti otoritas dan karisma (Bourdieu, 1985). Selain interkoneksi jenis modal, Bourdieu membayangkan suatu proses dimana satu bentuk kapital dapat diubah menjadi bentuk lain (Bourdieu, 1986). Misalnya, modal ekonomi dapat diubah menjadi modal budaya, sedangkan modal budaya dapat diubah menjadi modal sosial. Namun, ini proses rumit yang tidak dicapai secara langsung.

Modal keseluruhan dari berbagai fraksi kelas sosial terdiri dari proporsi yang berbeda dari berbagai jenis modal (Bourdieu, 1993). Misalnya, individu dapat

bersebelahan dalam ruang sosial namun memiliki sifat modal ekonomi dan budaya yang sangat berbeda. Perbedaan ini adalah konsekuensi dari hubungan yang kompleks antara individu dan kelas sosial. Selain itu, nilai yang melekat pada berbagai bentuk modal menjadi alat perjuangan kelas yang berbeda. Dia menjelaskan proses di mana 'kelas' menginvestasikan modal budaya dalam lingkungan akademik. Kelompok elit dan kelas menengah memiliki Identitasna untuk menginvestasikan modal budaya mereka kedalam pengaturan pendidikan yang optimal, investasi mereka sangat menguntungkan. Dari perspektif ini lembaga pendidikan dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menghasilkan keuntungan sosial (Bourdieu dan Passeron, 1977).

Sementara terkait jalur politik perempuan yang penulis asumsikan turut membentuk modal sosial politisi perempuan, analisisnya akan mengacu pada trikotomi yang telah disusun oleh Nan Kyung Choi (2019) dalam tulisannya yang berjudul *Women's Political Pathways in Southeast Asia*. Mekanisme apa yang digunakan perempuan calon gubernur (dalam hal ini Karolin dan Khofifah), dalam mengejar jabatan politik dan kekuasaan, mengeksplorasi pilihan, memobilisasi sumber daya, mengembangkan jaringan atau hubungan dengan konstituen, dan membangun gaya politik yang khas.

Jalur politik perempuan dibentuk oleh bagaimana mereka mengejar dan memenangkan jabatan politik. Sumber modal politik dan strategi elektoral yang digunakan oleh calon perempuan tampaknya memengaruhi makna dan praktik representasi politik. Nan Kyung Choi (2019), mengidentifikasi dua jalur utama, yaitu; Pertama, perempuan politisi yang mengambil alih kekuasaan "melalui medium" kerabat laki-laki. Kedua, perempuan politisi yang memiliki karir politik yang "sedari awal dibentuk oleh pilihan, atribut, dan upaya mereka sendiri, yang didasarkan pada rasa yang kuat tentang kemanjuran politik (*political efficacy*) mereka sendiri.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji efektivitas pendayagunaan modal sosial perempuan calon gubernur terhadap peluang elektabilitas mereka di Pilkada serentak 2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam pemanfaatan modal sosialnya masing-masing.

Karolin adalah tipe *bonding*, di mana ikatan jaringan cenderung mengarah ke dalam (Inward-looking), berada dalam suatu kelompok (*within a group*) atau komunitas dan memiliki karakteristik ikatan yang kuat (*strong ties*). Pendayagunaan jaringan Karolin bertumpu pada struktur mesin partai PDI-P (utama), jaringan Pemuda Katolik Kalbar, dan pengaruh adat dari komunitas Dayak (Dewan Adat Dayak/DAD). Untuk unsur dari DAD, dari hasil wawancara mendalam tersirat bahwa Karolin tidak terlalu meyakini loyalitas dan keaktifan dukungan dari mereka. Keraguan Karolin cukup beralasan karena situasi pembelahan dukungan etnis dayak salah duanya diakibatkan oleh munculnya calon gubernur dayak lain (Milton Crosby) serta semakin banyaknya tokoh Dayak yang aktif di partai lain selain PDI-P. Pada masa itu, tokoh Dayak yang juga politisi lokal tengah bersiap turun persiapan kampanye jelang Pileg 2019. Sehingga fokus politisi tokoh dayak terpecah antara kerja koalisi dalam Pilgub dan kerja pribadi untuk pencalonan legislatif, dimana peningkatan suara partai juga menjadi agenda

utama. Menanggapi situasi tersebut, Karolin menyebutnya sebagai “nasib kurang beruntung karena Pilgub Kalbar berdekatan dengan momen Pileg 2019 dan juga terdampak dari penggunaan politik identitas di Pilgub DKI 2017”.

Menguatnya segregasi pemilih yang mendukung berdasarkan pada identitas etnis dan agama, mengharuskan Karolin untuk *taking sides* dan memperkuat identitas jaringan primordialnya. Disisi lain, terdapat pula faktor konflik internal dalam tubuh DPD PDI-P Kalbar yang turut memengaruhi proses konsolidasi mesin partai di akar rumput. Friksi internal tersebut berkaitan dengan perebutan rekomendasi DPP PDI-P yang pada saat itu mengerucut pada dua nama yakni, Karolin dan Lazarus (DPR RI F-PDIP dapil Kalbar II). Lazarus sendiri bukan figur PDI-P sembarangan, karena jejaringnya lebih kuat di DPP ketimbang DPD. Namun berkat figuritas Cornelis yang pada saat itu masih sebagai Ketua DPD PDI-P dan masih menjabat Gubernur Kalbar, rekom partai akhirnya tetap turun ke Karolin. Proses turunnya rekomendasi partai yang terlambat memengaruhi moral Karolin dan moral tim. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, terlihat bahwa Karolin cenderung melakukan ikatan jaringan modal sosialnya dengan tipe *bonding*.

Meski berkualitas dari sisi pendidikan, profesi, dan organisasi di tingkat kepemudaan, pengalaman politik Karolin cenderung diakselerasi oleh modal politik ayahnya, Cornelis. Itu terlihat dimana dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu menapaki tangga karir politik dari legislator nasional, bupati, hingga menjadi calon gubernur. Dalam trikotomi jalur politik perempuan milik Choi Nan Kyung, Karolin memenuhi kriteria perempuan politisi jalur elit. Salah satu kriteria yang memosisikan perempuan hadir dari jalur politik elit, adalah adanya fasilitator politik yang muncul dari ikatan kekerabatan. Fasilitator ini menyediakan basis sumber daya dan juga membukakan pintu masuk melalui rekrutmen yang bersifat internal dan tertutup. Sementara itu, perempuan politisi dari jalur non-elit (menengah atau akar rumput) membutuhkan fase waktu yang lebih panjang untuk bisa sampai pada capaian karir politik Karolin. Karolin mampu berlari lebih jauh dari politisi perempuan lainnya karena memiliki sumber daya kultural, finansial, dan struktural yang siap digunakan kapan saja. Karolin dalam hal ini merupakan perempuan politisi yang mencapai kekuasaan "melalui medium" kerabat laki-laki

Meski demikian, keseluruhan modal sosialnya tersebut kurang terlihat efektivitasnya pada momen Pilgub Kalbar 2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas modal sosial individu juga dipengaruhi oleh aspek dinamis seperti pengalaman politik praktis, dinamika kekuasaan, dan budaya politik di suatu daerah. Meski Karolin mampu muncul sebagai calon Gubernur di usia yang relatif muda, memiliki pengalaman sebagai Bupati dan legislator nasional, namun dalam rangka perebutan kekuasaan melalui medium elektoral, nyatanya semua unsur modal sosial individu tersebut tetap membutuhkan dukungan eksternal. Dukungan tersebut secara khusus berupa kondusifitas aspek dinamis secara makro. Pengalaman politik praktis berbeda dengan pengalaman politik statis.

Ada masa dimana pejabat publik yang terpilih merasa sudah ‘selesai berpolitik’ ketika menjabat, sehingga ia tidak lagi merasa perlu mengasah kemampuan bersiasat atau kembali membiasakan diri membangun komunikasi politik, baik terhadap konstituen maupun sesama elit. Akibatnya modal sosial yang dimiliki menjadi tidak efektif karena hanya diaktivasi menjelang momen elektoral saja. Hal itu turut

membentuk tingkat resilient seorang politisi untuk berjuang baik dalam keadaan resourceful maupun tidak, ataupun ketika politik makro tidak berada dalam kendali. Kemampuan inilah yang belum dimiliki oleh Karolin.

Apabila temuan penelitian Kalbar disimpulkan, maka Karolin cenderung mewakili *proxy* dinasti politik dengan dimotivasi kesadaran identitas (etnis Dayak) dan menggunakan sentimen marwah partai (dalam hal ini PDI Perjuangan afiliasi partai politik yang diikuti yang memiliki basis tradisional di daerahnya). Bukti lainnya merujuk pada latar belakang motivasi Karolin terlibat dalam kontestasi Gubernur Kalbar 2018, ia menyebut ada tiga alasan. Pertama, ia merasa dengan menjadi Bupati dan kemudian Gubernur, artinya ia lebih bisa mendekatkan dirinya dengan masyarakat di Kampung halaman. Ia menyadari sebagai putri daerah Kalimantan Barat yang memiliki keistimewaan latar belakang dan fasilitas, ia harus bisa memberi kembali pada komunitasnya. Cara paling absah untuk bisa memengaruhi kebijakan adalah berperan sebagai eksekutif di daerah. Kedua, menaati perintah partai (PDI-Perjuangan). Ketiga, untuk memastikan keberlanjutan program yang telah dikerjakan oleh sang Ayah yang menjabat sebagai Gubernur Kalbar (dinasti politik).

Selain itu, kesadaran identitas bisa menguntungkan dan juga sebaliknya, bisa merugikan bagi kandidat kepala daerah. Apa yang dialami Karolin dalam Pilgub Kalbar 2018 menunjukkan kesadaran identitas menjadi tidak menguntungkan jika dimainkan dalam sistem sosial yang kompleks, terlebih jika gelombangnya muncul bukan dari internal masyarakat kalbar, melainkan dari luar (pengaruh politisasi identitas Pilgub DKI Jakarta 2017 yang masif dan berjarak hanya enam bulan sebelum Pilgub Kalbar 2018). Sehingga, penguatan isu keberlanjutan program kerja yang dibawa Karolin serta pasangannya tenggelam di bawah isu Identitas. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran identitas Dayak juga tidak selamanya efektif untuk mengoptimalkan kemenangan bagi kandidat Dayak. Faktor lain adalah marwah partai yang didayagunakan untuk pemenangan kandidat. Menggunakan identitas partai (*party id*) hanya efektif jika kondisi partai yang ada merupakan partai pemenang yang kuat di akar rumput dan tidak terjadi perpecahan di internal tubuh partai. Hal tersebut menjadi kesimpulan penelitian ini dari kasus Karolin di Pilgub Kalbar.

Perempuan calon gubernur lain adalah Khofifah yang maju dalam Pilgub Jatim 2018. Tipe ikatan jaringan sosial Khofifah adalah *bridging* dan *linking*, di mana ikatan jaringan bekerja dalam konteks keterhubungan yang menjembatani perbedaan melalui konteks perantaraan (*betweenness*) kelompok dan mengarah ke hubungan yang lebih eksternal. Modal sosial tipe Bridging dengan demikian menjembatani kelompok sosial, kelas sosial, ras, agama, karakteristik sosio demografi, atau sosial ekonomi lainnya. Modal sosial tipe *bridging* dikonseptualisasikan sebagai sebuah kepercayaan yang diperoleh (*earned trust*). Khofifah menunjukkan ketrampilan bersiasat yang lebih advanced dibanding Karolin. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kapasitas politik perempuan juga ditentukan dari seberapa panjang waktu yang didedikasikan untuk berpolitik dan membangun jaringan secara organik. Sehingga, ketergantungan pada mekanisme struktural mesin partai terbukti tidak menjamin kemenangan dalam eleksi. Terlebih di rezim pilkada langsung di mana yang menjadi pertimbangan adalah aspek figuritas, bukan sekadar kedekatan ideologis atau asosiasi dengan partai tertentu (*party id*).

Jalur politik perempuan juga dibentuk oleh bagaimana mereka mengejar dan memenangkan jabatan politik. Sumber modal politik dan strategi elektoral yang digunakan oleh calon perempuan tampaknya memengaruhi makna dan praktik representasi politik mereka. Khofifah disisi yang lain, merupakan perempuan politisi yang memiliki karir politik dengan kesadaran awal bercirikan diantaranya; kesadaran pilihan, atribut politik, dan upaya mereka sendiri, yang semuanya didasarkan pada keyakinan tentang kemanjuran politik (*political efficacy*) mereka sendiri.

Khofifah menjembatani kepentingan enam parpol pengusungnya dalam Pilgub 2018. Ia mencoba tidak merusak peluang politiknya untuk mendapatkan kendaraan politik dalam Pilgub dengan menghindari memunculkan nama Cawagub secara terburu-buru. Pada pertarungan ketiganya ini, Khofifah menjangkau seluruh tokoh dari elemen NU yang berada di berbagai macam partai. Dengan modal jaringan Muslimat NU Jatim yang berikrar memenangkan ketua umumnya dalam segala kondisi, Khofifah memperlihatkan kepada parpol pengusungnya, bahwa tidak akan ada hambatan untuk menjangkau pemilih hingga unit masyarakat terkecil, yakni keluarga. Seluruh anggota Muslimat NU Jatim memiliki loyalitas, rasa hormat dan kepercayaan kepada Khofifah. Kedalaman pengetahuan tentang peta elektoral di Jatim hasil dari pengalaman dua kali kalah (2008 dan 2013), akses terhadap program kerja kementerian selama menjadi Mensos, sebaran jaringan anggota Ormas cum relawan politik dalam struktur Muslimat NU didayagunakan Khofifah secara sistematis dan strategis untuk menjembatani (*bridging*) entitas parpol, ormas, dan pemilih akar rumput.

Khofifah menunjukkan kapasitas sebagai politisi perempuan yang mampu mengkapitalisasi pengalaman politik lintas rezim dan lintas ranah, kemampuan komunikasi politik, menyiasati jaringan politik di level elit dan akar rumput, dan memaksimalkan pemahaman mendalam tentang peta sosio-kultural-pragmatis di tingkat politik lokal Jatim. KIP berhasil mendayagunakan modal sosial dan jaringan sebagai medium menuju kemenangan. Khofifah juga membuktikan bagaimana ia selalu mampu menembus kandidasi dan merebut rekom partai politik untuk tarung merebut kursi Nomor 1 (Gubernur), bukan nomor 2 (Wakil) di Pilgub Jatim selama tiga kali berturut-turut. Semua ia dapatkan tanpa status sebagai seorang darah biru NU namun Khofifah memiliki NU ID yang kokoh. Ia menakhodai PP Muslimat NU selama 4 periode dan utamanya ia aktif terlibat secara kultural dan struktural di PW Muslimat NU Jatim.

Sebagai Badan Otonom, Muslimat NU memiliki AD/ART sendiri sehingga Khofifah leluasa mengatur dan mengkoordinasi kepentingan serta tujuan Muslimat NU. NU ID ini bagi Khofifah lebih kuat dan lebih bisa dipercaya, oleh karenanya dalam tiap essay yang ia tulis (terkumpul dalam buku 'Memimpin, Melayani' dan 'NU, Perempuan dan Indonesia'), Khofifah selalu menyatakan bahwa ia adalah santri NU dan kekuasaan di Jatim haruslah dipegang oleh unsur NU asli. Lebih jauh, ia selalu mengasosiasikan dirinya sebagai 'santri Gus Dur', bukan kader Partai PPP atau PKB, yang notabene juga memiliki basis pemilih NU. Ketrampilan siasat Khofifah dalam politik jauh lebih canggih dan itu membuktikan bahwa politisi pun tidak bisa dibentuk dalam semalam.

Selain itu, ditemukan faktor penting yang harus diperhatikan kandidat perempuan untuk masuk dan menang dalam kontestasi Pemilu. Faktor kapasitas dan kompetensi perempuan harus lebih ditingkatkan dan harus merata sebarannya baik di level lokal maupun nasional, agar mampu memiliki daya juang, daya saing dan daya tahan dalam berkompetisi di medan politik untuk kemudian memengaruhi produk

kebijakan secara substansial. Kekuatan dan kesiapan sumberdaya politisi perempuan agar dapat berperan dengan maksimal sangatlah penting, mengingat tanpa adanya politisi perempuan yang berkualitas, politik afirmasi apapun tidak akan menyelesaikan masalah marginalisasi perempuan dalam politik.

Kemunculan para perempuan pada pranata eksekutif di daerah tidak dengan serta merta. Mereka memerlukan waktu untuk melalui proses "*training ground*" dalam dimensinya masing-masing. Para perempuan tersebut harus belajar untuk memahami konstelasi kompetisi tingkat Kabupaten/ Kota/Provinsi melalui kanal personal dan impersonal. Ada yang melalui pembelajaran ruang privat (melalui pernikahan dan keturunan) dan ada yang meleburkan diri dalam gerakan akar rumput terlebih dahulu. Perbedaan antara yang pertama dan yang kedua adalah pada akses. Perempuan dengan latar elit (baik hasil pernikahan maupun hasil keturunan), memiliki kesempatan belajar dengan infrastruktur yang lebih siap. Sementara perempuan dari latar akar rumput memerlukan waktu dan sumber daya untuk berinvestasi merebut kepercayaan dan pengakuan atas integritas. Namun juga ada persamaan yang mengikat perempuan dari kedua latar ini, yakni kemunculan yang terlambat di ranah eksekutif akibat dari kultur patriarki dalam politik.

Kajian penelitian ini mengerucut pada dua karakteristik. Pertama, perempuan dengan latar dinasti politik atau kekerabatan politik. Kedua, perempuan yang menyusul rekam jejak melalui pengalaman profesional individu dan aktivitas gerakan akar rumput sebagai jangkar masuk kedalam kompetisi. Khusus kandidat perempuan yang memiliki keterkaitan dengan jejaring oligarki di daerahnya, perjalanannya untuk dapat duduk sebagai kepala daerah akan lebih mudah. Apalagi jika ia memiliki keterikatan dengan suatu dinasti politik tertentu, kesempatan bagi perempuan untuk menjadi kepala daerah biasanya akan semakin mudah.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, New Jersey: Princeton University Press.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms Of Social Capital in Handbook Of Theory and Research For the Sociology Of Education* J. Richardson (ed). New York: Greenwood Press.
- Jacobson, Gary C. dan Samuel Kernell. (1983). *Strategy and Choice in Congressional Elections*. New Haven: Yale University Press.
- Marsh, David dan Gery, Stoker. (2011). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Moleong, J. Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- Pamungkas. (2001). *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Parawansa, Khofifah Indar. (2015). *NU, Perempuan Indonesia: Sudut Pandang Islam Tradisional*. Bandung: Penerbit NUANSA CENDEKIA.
- Parawansa, Khofifah Indar. (2015). *Memimpin Melayani: Pandangan Sosial Politik*. Bandung: Penerbit NUANSA CENDEKIA.
- Putnam, Robert D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community*. New York: Simon and Schuster.
- Bourdieu, Pierre. (1985). The Genesis of the Concepts of Habitus and Field. *Journal Sociocriticism* 2. Halaman 11-24.

- Choi, Nankyung. (2019). *Women's Political Pathways in Southeast Asia*, *Journal International Feminist Journal of Politik*. Routledge, Vol 21, No. 2. 224-248.
- Corbin, Juliet and Anselm, Strauss. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canon Evaluative Criteria dalam *Qualitative Sociology*, Vol. 13, No. 1, 21.
- Fox, Richard L and Lawless, Jennifer L. (2004). Entering the arena? Gender and the Decision to Run For Office. *American Journal of Political Science*, Vol 48, No. 2, 265-280.
- Purwaningsih, Titin. (2014). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. (Disertasi: Program Doktor Ilmu Politik FISIP).
- Bari, Farzana. (2005). *Women's Political Participation: Issues and Challenges'*. Bangkok: United Nations Report.
- Cakra Wikara Indonesia. (2018, Oktober). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Depok: PSJ UI.

Wawancara

- Azis, Azizah. (2020, Oktober 07). Wawancara Pribadi.
- Azhar Asumta, Zahrul. (2020, Maret 17). Wawancara Pribadi.
- Margaret Natasha, Karoline. (2020, Februari 24). Wawancara Pribadi.
- Nainggolan, Ranto. (2020, Februari 25). Wawancara Pribadi
- Ndari, Ken. (2020, Februari 26). Wawancara Pribadi.
- Pribadi, Airlangga. (2020, September 16). Wawancara Pribadi.
- Tim sukses KIP, Gus Hanss. (2020, Maret 17). Wawancara Pribadi.